

# EVALUASI PENCAPAIAN KOTA LAYAK ANAK PADA ASPEK INFRASTRUKTUR DI KOTA BANDUNG

**PUTRI AMELYA ALRASYID**

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota  
Institut Teknologi Nasional Bandung  
Email: putriamelya93@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Pada tahun 2019 Kota Bandung meraih penghargaan dengan predikat Nindya (peringkat ketiga) dalam penilaian Kota/Kabupaten Layak Anak. Namun, masih terdapat beberapa masalah terkait penyediaan infrastruktur layak anak di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur di Kota Bandung dan faktor pendukung serta penghambatnya. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis isi berdasarkan data sekunder dan primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur di Kota Bandung belum optimal. Variabel dengan nilai capaian tertinggi yaitu variabel hak sipil dan kebebasan. Sedangkan variabel dengan nilai capaian terendah adalah variabel perlindungan khusus. Terbatasnya anggaran menjadi penyebab utama belum optimalnya pencapaian Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur di Kota Bandung. Namun, Pemerintah Kota Bandung mendapatkan dukungan berupa dana dan partisipasi dari berbagai pihak dalam pencapaian Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur.*

**Kata kunci: Kota Layak Anak, Infrastruktur, Evaluasi Pencapaian**

## **ABSTRACT**

*In 2019, Bandung City won an award with the title nindya (ranked third) in the assessment of City / Regency Worthy of Children. However, there are still some problems related to the provision of child-worthy infrastructure in the city of Bandung. This research aims to evaluate the achievement of a Child-Worthy City on aspects of infrastructure in the city of Bandung and its supporting factors and obstacles. The analytical methods used are descriptive statistics and content analysis based on secondary and primary data. The results showed that the achievement of The Child Worthy City in the infrastructure aspect in the city of Bandung has not been optimal. The variables with the highest achievement values are the variables of civil rights and freedoms. While the variable with the lowest achievement value is a special protection variable. Limited budget is the main cause of the achievement of the City of Children's Worth in the infrastructure aspect in the city of Bandung. However, the Bandung City Government gets support in the form of funds and participation from various parties in the achievement of Child Worthy City on infrastructure aspects.*

**Keywords: Child-Friendly City, Infrastructure, Achievement Evaluation**

## 1.PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia di Indonesia merupakan tanggungjawab bersama mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan konsep Kota/Kabupaten Layak Anak yaitu Kota/Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan yang memperhatikan hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media massa dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan mulai dari kebijakan, program hingga kegiatan untuk memastikan hak dan perlindungan anak dapat terpenuhi. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemukiman atau *City And Town Summit* yang diadakan di Istanbul, Turki pada tahun 1996 UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan gagasan pengembangan *Child Friendly City Initiative* yang terinspirasi oleh penelitian Kevin Lynch pada tahun 1971-1975 tentang "Persepsi Anak Terhadap Lingkungan".

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia yang dirilis dalam buku Statistik Indonesia 2019 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebesar 30% atau 79 juta penduduk Indonesia adalah penduduk berusia 0-17 tahun atau anak-anak. Peningkatan kualitas anak sebagai generasi penerus bangsa berkaitan erat dengan perlunya memperhatikan kebutuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Dalam rangka pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan ruang lingkup kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak yang salah satunya yaitu pembangunan dibidang infrastruktur. Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum, sosial dan penyediaan infrastruktur yang layak anak. Berdasarkan hasil kajian mengenai penelitian-penelitian sebelumnya terkait evaluasi pencapaian Kota/Kabupaten Layak Anak di Indonesia yang dilakukan oleh Mustiqowati (2017), Safitri (2013), Setiani (2018), Elizabeth (2015), Said (2017) dan lain-lain dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian tersebut mengkaji evaluasi pencapaian Kota/Kabupaten pada aspek hukum dan administrasi. Sangat terbatas penelitian yang mengkaji evaluasi pencapaian Kota/Kabupaten pada aspek infrastruktur. Padahal, infrastruktur merupakan penunjang utama dalam mendukung tumbuh kembang anak.

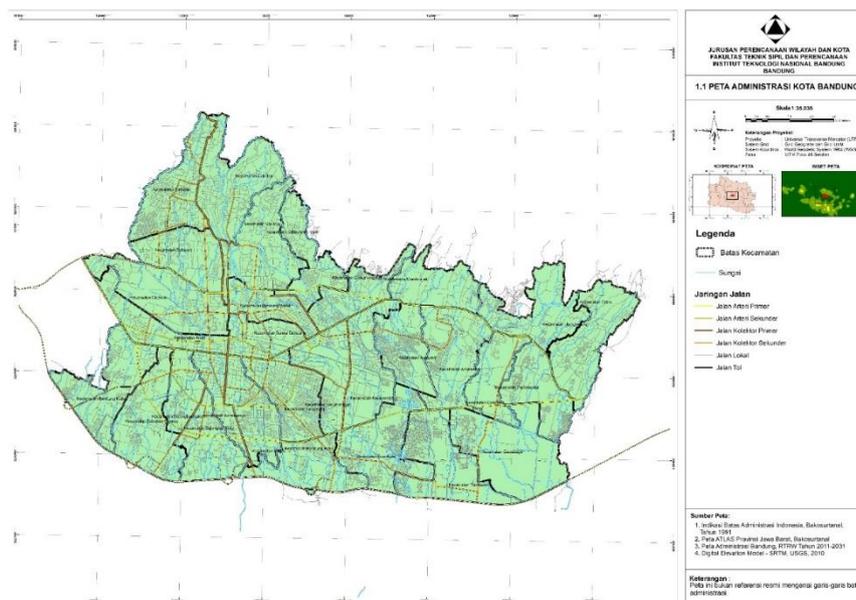
Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Hak Anak untuk mengembangkan Kota/Kabupaten Layak Anak didaerahnya. Hasilnya, pada tahun 2019 Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi pelopor pengembangan Kota/Kabupaten Anak terbaik. Namun, belum ada satupun Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berhasil mendapatkan penghargaan kategori tertinggi yaitu "Kota Layak Anak" atau kategori kedua yaitu "utama". Artinya pencapaian masing-masing indikator Kota/Kabupaten Layak Anak di Provinsi Jawa Barat belum optimal.

Pada tahun 2019, Kota Bandung berhasil mendapatkan skor penilaian Kota Layak Anak yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan meraih penghargaan Kota Layak Anak pada kategori Nindya (Peringkat ketiga). Kota Bandung melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan Hak Anak telah menjadikan 65% kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung menjadi layak anak pada tahun 2019. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak khususnya dalam aspek infrastruktur yaitu mengembangkan layanan ramah anak di puskesmas, menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mengembangkan sekolah ramah anak dan pembangunan infrastruktur diruang publik seperti taman, rute aman selamat sekolah (RASS) dan menyediakan fasilitas pojok ASI di setiap gedung pemerintah dan swasta. Namun masih banyak permasalahan terkait anak di kota ini yaitu terbatasnya ketersediaan fasilitas pojok asi dan area bebas rokok di ruang publik, hanya terdapat 24 sekolah yang ramah anak, hanya memiliki 1 puskesmas dengan pelayanan ramah

anak dan terbatasnya ketersediaan taman bermain anak baik dalam skala regional maupun kawasan. Terlebih, terdapat sejumlah infrastruktur seperti taman yang belum ramah anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Pencapaian Kota Layak Anak di Kota Bandung dan Apa Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya? Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi pencapaian Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur di Kota Bandung dan faktor pendukung serta penghambatnya dengan beberapa sasaran sebagai berikut.

1. Teridentifikasinya kondisi eksisting Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur .
2. Teridentifikasinya pencapaian Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur.
3. Teridentifikasinya faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur di Kota Bandung

Adapun wilayah studi kajian (lihat Gambar 1) yaitu Kota Bandung yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat. Secara astronomis, Kota Bandung terletak pada 107° 33' 34" - 107° 43' 50" BT dan 6° 50' 38" - 6° 58' 50" LS. Secara geografis Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 MDPL. Kota Bandung memiliki luas 167,31 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 30 kecamatan dan 151 kelurahan.



Sumber: Hasil Analisis, 2021

**Gambar 1. Peta Administrasi Kota Bandung**

## 2.KAJIAN TEORI

### 2.1 Indikator Kota Layak Anak

Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak digunakan untuk mengukur pencapaian pemenuhan hak anak dalam rangka pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak. Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak menjadi standar baik untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah Kota/Kabupaten dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kota/Kabupaten Layak

Anak indikator, Draft rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak dan penelitian oleh Nour (2013) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 1. Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak**

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Kelembagaan Terkait Infrastruktur	Kebijakan/Program terkait infrastruktur	Ketersediaan kebijakan/program pemenuhan hak dan perlindungan anak
	Anggaran pemenuhan infrastruktur	Ketersediaan anggaran pengadaan infrastruktur
Hak sipil dan kebebasan Terkait Infrastruktur	Fasilitas informasi Layak Anak	Ketersediaan Informasi Layak Anak (ILA)
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	Pendidikan Anak Usia Dini berbasis Holistik - Integratif	Ketersediaan lembaga PAUD-HI
	Ketersediaan Infrastruktur layak anak ditempat umum	Ketersediaan ruang bermain ramah anak (RBRA) sesuai standar
		Banyaknya sekolah yang telah memiliki fasilitas Rute Aman Selamat ke atau dari Sekolah (RASS)
Banyaknya sekolah yang telah difasilitasi Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)		
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Fasilitas kesehatan	Jumlah puskesmas yang terakreditasi
		Jumlah puskesmas yang telah memenuhi indikator ramah anak
		Ketersediaan fasilitas Pojok Asi
	Akses terhadap air minum dan sanitasi	Jumlah penduduk yang memiliki akses Air Minum
Jumlah penduduk yang memiliki akses Sanitasi		
Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Persentase kawasan tanpa rokok	
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah yang telah memenuhi indikator sekolah ramah anak dan ditetapkan melalui SK kepala dinas
	Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak	Ketersediaan Pusat Kreatif Anak (PKA)
		Ketersediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas yang ramah anak
Perlindungan Khusus	Pelayanan bagi anak korban bencana	Tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
		Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana
	Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas,	Ketersediaan prasarana dan sarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas

Sumber: Nour (2013), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 12 Tentang Indikator Pengembangan KLA dan Draft Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak

## 2.2 Stakeholder Pelaksana Kota/Kabupaten Layak Anak

Adapun pemangku kepentingan yang memiliki tugas pokok dan kedudukan dibidang penyediaan infrastruktur layak anak berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 463/Kep.518-DP3APM/2020 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode Tahun 2019-2023 yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga serta Dinas Perhubungan.

## 2.3 Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk membandingkan pelaksanaan masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Menurut Lester dan Stewart dalam (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018) evaluasi kebijakan memiliki dua tujuan yang berbeda yaitu menggambarkan dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan mengukur pencapaian berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan adalah pengukuran pencapaian suatu kebijakan atau program yang dilakukan baik pada tahap implementasi maupun terhadap dampak (*outcome*). Evaluasi bertujuan sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas suatu kebijakan/program. Evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah membandingkan realisasi masukan/*input* yang terdiri atas indikator kebijakan/program dan anggaran pemenuhan infrastruktur layak anak dan keluaran/*output* yang terdiri atas indikator infrastruktur layak anak terhadap standar Kota/Kabupaten Layak Anak.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian evaluatif. Penelitian ini akan membandingkan pelaksanaan atau realisasi kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak yang telah dilakukan di Kota Bandung dengan standar indikator Kota/Kabupaten layak Anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak dan pengembangan parameter yaitu membandingkan realisasi kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak dengan rencana pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandung yang telah ditetapkan sebelumnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui survei primer dan sekunder. Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer melalui observasi akan dilakukan untuk melihat kembali dilapangan (*crosscheck*) terkait kondisi indikator yang memiliki nilai capaian yang rendah. Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak-pihak pemangku kebijakan sebagai penyedia infrastruktur layak anak dan anak-anak sebagai pengguna infrastruktur yang akan diwakili oleh Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB). Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*). Adapun penyedia infrasturktur layak anak yang akan menjadi responden dalam wawancara ini yaitu minimal pejabat dinas Eselon III atau pejabat dinas Eselon IV yang menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan survei sekunder yaitu pengumpulan data ke beberapa dinas sebagai

penyedia infrastruktur layak anak. Data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah data yang dikeluarkan pada tahun 2012 yaitu saat peraturan daerah Kota Bandung tentang penyelenggaraan Kota/Kabupaten Layak Anak dikeluarkan hingga sekarang.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan analisis isi. Metode statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan keterangan mengenai kondisi eksisting dan capaian Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur. Kondisi eksisting dilakukan untuk mengetahui gambaran kondisi infrastruktur layak. Setelah mengetahui kondisi eksisting, selanjutnya akan dilakukan evaluasi yaitu membandingkan pelaksanaan atau realisasi kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak di Kota Bandung dengan standar indikator Kota/Kabupaten Layak Anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak dan pengembangan parameter yaitu membandingkan pelaksanaan atau realisasi kebijakan Kota Layak Anak dengan rencana pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandung yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk persentase sehingga dapat diketahui besaran capaian *real* Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur dan agar diperoleh indikator yang memiliki nilai capaian yang tinggi dan rendah. Sedangkan analisis isi akan dilakukan terhadap hasil wawancara terkait indikator yang memiliki nilai capaian tinggi dan rendah untuk mendapatkan kesimpulan mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur di Kota Bandung sehingga sasaran ketiga dalam penelitian ini dapat tercapai.

#### **4. EVALUASI PENCAPAIAN KOTA LAYAK ANAK PADA ASPEK INFRASTRUKTUR DI KOTA BANDUNG**

##### **4.1 Capaian Kota Bandung Sebagai Kota Layak Anak**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak berdasarkan indikator Kota/Kabupaten Layak Anak yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kota/Kabupaten Layak Anak dan pengembangan parameter Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kota/Kabupaten Layak, Tabel 2 berikut memperlihatkan hasil evaluasi Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur di Kota Bandung.

**Tabel 2. Capaian Kota Bandung Sebagai Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur di Kota Bandung**

Variabel	Indikator	Ukuran	Capaian Berdasarkan Permen PPPA	Capaian Berdasarkan Pengembangan (%)	Keterangan	Total Capaian (%)
Kelembagaan Terkait Infrastruktur Layak Anak	Jumlah kebijakan/program pemenuhan hak dan perlindungan anak	Ada dan Diimplementasikan	Ada dan Dimplementasikan	100	Hingga tahun 2019 terdapat 21 kebijakan yang telah dikeluarkan dan diimplementasikan	50
	Persentase anggaran pengadaan infrastruktur layak anak	Ada dan Meningkatkan tiap tahun	Ada	1	Pada tahun 2020, total APBD Kota Bandung sebesar Rp. Rp. 7.117.204.956.964 sedangkan total anggaran pemenuhan infrastruktur layak anak hanya 42.240.765.842.	
Hak sipil dan kebebasan Terkait Infrastruktur Layak Anak	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang dapat diakses oleh semua anak dan gratis	Tersedia dan Dapat diakses oleh semua anak, dan jumlah Fasilitas meningkat setiap tahun	Tersedia dan Meningkatkan setiap tahun baik dari segi jumlah maupun kualitas	100	Hingga tahun 2019 terdapat 1731 PISA berupa perpustakaan dan taman bacaan yang telah dibangun	100
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	Jumlah lembaga PAUD-HI	Tersedia dan meningkat tiap tahun	Tersedia dan meningkat setiap tahun	85	Terdapat 575 PAUD HI dari Total 679 PAUD yang ada di Kota Bandung	25
	Jumlah ruang bermain ramah anak (RBRA) sesuai standar	Tersedia dan meningkat tiap tahun	Tersedia dan meningkat secara jumlah	6	RBRA yang dibangun berupa taman disetiap RW, tahun 2017 hanya 94 dari 1591 RW di Kota Bandung yang telah dibangun RBRA.	

Variabel	Indikator	Ukuran	Capaian Berdasarkan Permen PPPA	Capaian Berdasarkan Pengembangan (%)	Keterangan	Total Capaian (%)
	Jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangan Rute Aman Selamat ke/dari Sekolah (RASS)	Tersedia dan meningkat tiap tahun	Tersedia dan meningkat secara jumlah	7	Hingga tahun 2020 hanya 76 dari 1154 sekolah yang telah dibangun fasilitas RASS	
	Jumlah sekolah yang terbangun ZoSS	Tersedia dan meningkat setiap tahun	Tersedia	1	Tahun 2016 hanya 12 dari 1154 sekolah yang telah dibangun fasilitas ZoSS	
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Puskesmas Terakreditasi	Setiap kecamatan memiliki minimal 1 (satu) Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Ada dan setiap kecamatan telah memiliki minimal 1 puskesmas yang telah terakreditasi	93	Hingga tahun 2019 terdapat 68 dari 73 UPT Puskesmas di Kota Bandung yang telah terakreditasi	71
	Jumlah puskesmas dengan pelayanan ramah anak	Ada dan meningkat setiap tahun	Ada dan meningkat setiap tahun	44	Hingga tahun 2019 hanya 32 dari 73 UPT Puskesmas yang telah memenuhi indikator PRAP	
	Jumlah Pojok Asi	Tersedia dan meningkat setiap tahun	Tersedia dan meningkat setiap tahun	83	Pada tahun 2018 terdapat 47 dari 56 kantor pemerintahan yang telah menyediakan fasilitas pojok asi	
	Akses Air Minum	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun	77	Tahun 2018, jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yaitu 1.932.276 dari 2.503.708	
	Akses Sanitasi	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun	99	Tahun 2018, jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yaitu 2.501.778 dari 2.503.708	
	Jumlah kawasan tanpa rokok	Tersedia dan meningkat setiap tahun	Tersedia	28	Tahun 2020 Persentase KTR sebesar 28% diberbagai jenis fasilitas umum	

Variabel	Indikator	Ukuran	Capaian Berdasarkan Permen PPPA	Capaian Berdasarkan Pengembangan (%)	Keterangan	Total Capaian (%)
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Jumlah SRA yang ditetapkan melalui SK kepala daerah	Minimal 1 SRA di setiap jenjang pendidikan, dan meningkat setiap tahun	Terdapat 1 SRA di setiap jenjang pendidikan, dan meningkat setiap tahun	36	Tahun 2019 terdapat 413 dari 1154 satuan pendidikan diberbagai jenjang yang ada telah ditetapkan sebagai SRA melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung	45
	Jumlah Pusat Kreatif Anak (PKA)	Tersedia Ruang Kreatifitas Anak dan dapat diakses/dimanfaatkan oleh semua anak	Tersedia dan Dapat diakses/dimanfaatkan oleh semua anak	100	Pada tahun 2016 berjumlah 30 PKA berupa taman tematik yang telah dibangun di Kota Bandung	
	Jumlah fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas yang ramah anak	Tersedia dan meningkat setiap tahun	Belum Tersedia	0	Belum Tersedia	
Perlindungan Khusus	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Tersedia dan berfungsi	Belum Tersedia	0	Belum Tersedia	16
	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	Ada dan Meningkatkan Setiap Tahun	Belum Ada	0	Belum Tersedia	
	Jumlah sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas	Tersedia dan Berfungsi	Tersedia namun Kurang berfungsi dengan baik	50	Tahun 2017 terdapat 10 ruas jalan dan 10 lokasi sekolah memiliki trotoar yang ramah bagi anak penyandang disabilitas. Namun, beberapa trotoar dinilai belum layak untuk penyandang disabilitas karena memiliki desain yang justru membahayakan penggunaanya	
<b>Capaian Kota Bandung Sebagai Kota Layak Anak Pada Aspek Infrastruktur</b>						<b>48</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berikut ini adalah rincian capaian masing-masing variabel secara berurutan berdasarkan variabel yang memiliki nilai capaian tertinggi sebagai berikut.

#### **1. Variabel Hak Sipil dan Kebebasan**

Jumlah perpustakaan dan taman bacaan mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun kualitas. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Hasilnya hingga tahun 2019 terdapat 1731 perpustakaan dan taman bacaan binaan di Kota Bandung. Selain itu, perpustakaan umum yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang ramah anak seperti ruang baca buku untuk anak, kidsmart corner, ruang inklusi, ruang laktasi dan *computer braille*.

#### **2. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Variabel ini terdiri atas enam variabel yaitu puskesmas yang terakreditasi, puskesmas ramah anak, pojok asi, akses air minum dan sanitasi dan kawasan tanpa rokok. Indikator yang memiliki nilai capaian tertinggi yaitu puskesmas terakreditasi sebesar 93% karena hingga tahun 2019 terdapat 68 dari 73 UPT Puskesmas di Kota Bandung yang telah terakreditasi. Sedangkan indikator yang mendapatkan nilai capaian terendah adalah kawasan tanpa rokok. Pada tahun 2020 persentase KTR sebesar 28% di beberapa jenis fasilitas umum

#### **3. Kelembagaan Terkait Infrastruktur Layak Anak**

Variabel ini terdiri atas dua indikator yaitu kebijakan/program terkait infrastruktur layak anak dan anggaran pemenuhan infrastruktur layak anak. Indikator yang memiliki nilai capaian tertinggi yaitu kebijakan/program terkait infrastruktur layak anak sebesar 100% karena hingga tahun 2019 terdapat 21 kebijakan baik peraturan daerah maupun SK kepala dinas yang telah dikeluarkan dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan dalam pemenuhan anggaran infrastruktur layak anak pada tahun 2020, persentase total anggaran pemenuhan infrastruktur layak anak terhadap APBD Kota Bandung hanya 1%.

#### **4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Variabel ini terdiri atas tiga indikator yaitu Sekolah Ramah Anak (SRA), Pusat Kreatif Anak (PKA) dan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas yang ramah anak. Indikator yang memiliki nilai capaian tertinggi adalah indikator Pusat Kreatif Anak sebesar 100%. Kota Bandung telah menyediakan Pusat Kreatif Anak (PKA) berupa taman tematik hingga tahun 2016 terdapat 30 taman tematik. Namun, salah satu indikator pada variabel ini belum terpenuhi yaitu tersedianya fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas yang ramah anak.

#### **5. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Variabel ini terdiri atas layanan PAUD HI, ruang bermain ramah anak (RBRA), Rute Aman Selamat Sekolah dan ZoSS (Zona Selamat Sekolah). Indikator yang memiliki nilai capaian tertinggi adalah indikator layanan PAUD HI. Pada tahun 2019 sebanyak 575 atau 85% PAUD yang telah berbasis HI di Kota Bandung. Sedangkan indikator yang mendapatkan nilai capaian terendah adalah tersedianya ZoSS (Zona Selamat Sekolah). Pada tahun 2016, jumlah sekolah yang telah difasilitasi Zona Aman Selamat Sekolah berjumlah 12 dari 1154 atau hanya 1% sekolah yang ada di Kota Bandung.

#### **6. Perlindungan Khusus**

Variabel ini terdiri atas tiga indikator yaitu adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, jumlah desa/kelurahan tangguh bencana dan jumlah sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas. Namun hanya 1 indikator yang telah terpenuhi yaitu sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas. Adapun prasarana dan sarana yang telah disediakan adalah trotoar yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas di 10 ruas jalan dan 10 lokasi sekolah.

## 4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kota Layak Anak Pada Aspek Infrastruktur di Kota Bandung

Berikut ini adalah hasil analisis isi faktor pendukung yang secara berurutan berdasarkan kata kunci paling banyak disampaikan oleh responden.

1. Adanya dukungan dunia usaha yang turut memberikan andil dalam upaya pemenuhan infrastruktur layak anak di Kota Bandung. Dukungan dari dunia usaha ini berupa dana dan penyediaan pojok asi dan Kawasan Tanpa Rokok pada lingkungan usahanya.
2. Adanya dukungan masyarakat berupa pembentukan satuan tugas (satgas) kota layak anak ditingkat kelurahan. Satgas KLA ditingkat kelurahan ini telah membantu dalam pencarian dana CSR untuk pengembangan fasilitas ditiap infrastruktur ramah anak dan membangun taman bermain ditingkat RW
3. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak baik ditingkat Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung yaitu berupa advokasi dan sosialisasi terkait konvensi hak anak pada setiap klaster Kota Layak Anak kepada SKPD pelaksana tugas, LSM, Forum Anak, dunia usaha dan masyarakat.
4. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan berupa rapat koordinasi dengan DP3APM Kota Bandung mengenai pembentukan Puskesmas Ramah Anak (PRAP)
5. Pelibatan Forum Anak Kota Bandung sebagai perwakilan anak-anak di Kota Bandung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
6. Pelibatan Forum Anak Kota Bandung dan masyarakat dalam pembentukan Puskesmas Ramah Anak (PRAP)
7. Pelibatan Forum Anak Kota Bandung dalam Verifikasi Lapangan *Hybrid* (VLH) terkait indikator infrastruktur layak anak yang telah dilaksanakan sebagai upaya evaluasi kota layak anak di Kota Bandung.

Adapun faktor penghambat yang secara berurutan berdasarkan kata kunci paling banyak disampaikan oleh responden.

1. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan dan pemeliharaan infrastruktur layak anak
2. Keterbatasan anggaran untuk pembinaan satuan tugas KLA dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia
3. Dalam pelaksanaan, masih kurangnya pengetahuan dari masing-masing SKPD pelaksana tugas mengenai infrastruktur yang ramah anak sehingga beberapa pembangunan justru tidak memiliki desain yang ramah anak.
4. Kurangnya pemahaman gugus tugas kota layak anak mengenai tugas pokok masing-masing.
5. Kurangnya pemeliharaan baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai pengguna terhadap infrastruktur dan fasilitas yang telah disediakan.
6. Kurangnya dukungan keterbukaan data dari masing-masing dinas pelaksana tugas maupun dunia usaha yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Kota Layak Anak.
7. Kurangnya koordinasi dari beberapa SKPD pelaksana tugas kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai *leading sector* pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandung.
8. Tidak adanya koordinasi lebih lanjut dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas KLA terkait hasil evaluasi KLA yang dilakukan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Pencapaian Kota Layak Anak Pada Aspek Infrastruktur di Kota Bandung dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur di Kota Bandung belum optimal. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata capaian indikator infrastruktur layak anak di Kota Bandung hanya mencapai 48%. Terbatasnya anggaran, pengetahuan dan pemahaman terkait standar infrastruktur yang layak anak dan tugas pokok masing-masing SKPD pelaksana tugas serta kurangnya pemeliharaan terhadap infrastruktur yang telah disediakan menjadi penyebab utama belum optimalnya pencapaian Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur di Kota Bandung. Namun, Pemerintah Kota Bandung mendapatkan dukungan baik dana maupun partisipasi dari berbagai pihak seperti masyarakat, LSM dan dunia usaha dalam pencapaian Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur.

## DAFTAR RUJUKAN

- Annisa, Nurul. 2019. *Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur Ramah Anak Di Kota Padang*. Padang: Universitas Negeri Padang
- Draft Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak
- Elizabeth, Adriani dkk. 2015. *Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Fithriyyah, Ummul Mustiqowati. 2017. *Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru*. Kepulauan Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Hendriyani. 2011. *Analisis Isi: Sebuah Pengantar Metodologi Yang Mendalam Dan Kaya Dengan Contoh*. Jakarta: Prenada Media Group
- Nour, Osman Elhassan. 2013. *Building Child Friendly Cities In The MENA Region*. Riyadh: The Arab Urban Development Institute (AUDI)
- Nugrahani, farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*. Jakarta: Cakra Books
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak
- Rosalin, Lenny. 2016. *Child Friendly City Development In Indonesia: Building A System For The Protection And Promotion Of Children's Rights*. Jakarta: Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- Safitri, Nissa Faradila. 2013. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Surabaya*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Said, Mohammad Rohmd dkk. 2017. *Implementasi Kota Layak Anak di Kabupaten Demak*. Kabupaten Kudus: Universitas Muria Kudus
- Setiani, Dewi Raden. 2018. *Implementasi Kebijakan Pembentukan Kota/Kabupaten Layak Anak Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Pandeglang*. Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen.
- Sholikhah, Amirotnun. 2016. *Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto